

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ali, M. (2021). *Viktimologi* (Y. S. Hayati, Ed.; 1 ed., Vol. 1). PT. Rajagrafindo Persada.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Y. Novita, Ed.). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Manggalatung, S. (2014). *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM. Dimensi Keislaman dan Ke Indonesiaan*. Focus Grahamedia.
- Nuraeny, H. (2013). *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (2 ed.). Sinar Grafika.
- Rodliyah, & Salim. (2021). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)* (1 ed., Vol. 3). PT Rajagrafindo Persada.
- Romli. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM* (Q. Barkah, Ed.; 1 ed., Vol. 1). CV. Doki Course and Training. <http://book.dokicti.org/index.php/Press>
- Sidharta, N. (2023). *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (S. H. Hayati, Ed.; 1 ed., Vol. 1). PT Rajagrafindo Persada.
- Syamsudin. (2015). *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim* (2 ed., Vol. 2). Kencana Prenada Media Group.
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed., Vol. 1). Publika Global Media.
- Yulia, R. (2010). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (1 ed., Vol. 1). Graha Ilmu.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3 ed., Vol. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

E. Sumber Lain

- Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4720).

- Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6755).
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 293, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5602)
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 293, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5602)
- Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 6184).
- Mahkamah Agung. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2022).
- Akhirudin, & Gunadi, A. (2024). TINJAUAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Attamimi, F., & Tanuadja. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 12134–12141. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Ayu Novita, R., & Basuki Prasetyo, A. (2017). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (TANAH KERING) DI DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 6(2), 1.

- Badri, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 1–6. <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>
- Damayanti, I., & Paramudhita, R. R. (2024). Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 8585–8591. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Dwi Sanjaya, T. (2025). Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3669–3677.
- Evi Fitriani, Ahmad Ahsin Thohari, & Irsyaf Marsal. (2025). Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 875–888. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>
- Faisal. (2010). PARADIGMA HOLISTIK HUKUM PROGRESIF. *Universitas Bangka Belitung*, 1(1), 79–94.
- Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *International Journal of Cross Knowledge*, 1(2), 3014–3328. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231123080741-4-491294/kronologi-lengkap-penetapan->
- Hasibuan, K., Budi Sastra Panjaitan, & Arifuddin Muda Harahap. (2024). RUU KUHAP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(2), 57–72. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023>
- Hs, A. R. R. (2023). Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option. *UNES LAW REVIEW*, 6(2), 6338–6348. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Irfandy, F., Amlizyan, F., & Windari, R. (2025). Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum: Kajian Perbandingan Asas Legalitas Indonesia dan Prancis. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 87–96. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.269>
- Kaihena, N. G. (2023). KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETENAGA KERJAAN DI INDONESIA. *Lex Privatum*, 11, 1–10.
- Krisnamurti, H. (2021). PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PEMBERIAN RESTITUSI MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

- PERDAGANGAN ORANG. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 55–68.
- Lubis, Saipudin, L., & Amin, I. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 176–190.
- Manangkalangi, Yobbes. J. M., Timomor, A., & Rawung, H. B. R. (2026). Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5, 665–680. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5411>
- Marasabessy, F. (2015). RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53–75. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3>
- Mukti, S. P. Q. W., & Habibullah, Abd. W. (2025). Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan bagi Korban. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 24–36. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.862>
- Munawar, M. A., & Hanaafi. (2023). INTEGRASI ASAS LEGALITAS DAN ASAS OPORTUNITAS: SUATU KAJIAN KOMPARATIF TERHADAP PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK PENUNTUTAN. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7), 1–15. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Mursito. (2024). Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana. *Judge : Jurnal Hukum*, 5(2), 133–140. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.682>
- Nuryadi, D. (2016). TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 395–408.
- Okta Rifo Fauziyah, & Yana Indawati. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(3), 49–60. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1083>
- Paul SinlaEloE. (2017). *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*. Setara Press.

- Permatasari, I., Farina, T., & Ali, N. (2025). RESTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA: KEBIJAKAN, TANTANGAN DAN PRAKTIKNYA DI PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(2), 1167–1178.
- Prayoga, D., & Suci, C. (2026). Peran Bantuan Hukum dalam Mencegah Reviktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 03(1), 203–213. <https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada>
- Purwito, E. (2023). KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK GULA PASIR KADALUARSA DI KOTA SURABAYA. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Ramadhani, D. P., Berdian Tamza, F., Dewi, E., & Shafira, M. (2026). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia pada Korban Perdagangan Orang dalam Proses Penyidikan Kepolisian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3006–3015. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3616>
- Reza Aulia Qusnul Khotimah. (2025). Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 176–184. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1052>
- Rivana, S. R., Parmono, B., & Hidayati, R. (2025). PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG KELAS IA). *DINAMIKA Jurnal Hukum Ilmiah*, 31(2), 13300–13313. <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>,
- Sari, A., & Sambas, N. (2025). Dampak Restitusi Terhadap Kesehatan Mental Anak Korban Persetubuhan: Studi Longitudinal. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(2), 74–88. <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i2.11511>
- Setyani, W. R., & Kristiyadi, K. (2021). PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL. *Verstek*, 9(4), 738–747. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72429>
- Setyawan, P. V. (2021). ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *JUSTIA ET PAX JURNAL HUKUM*, 37(1), 127–146.

- Siagian, F. S. (2025). Implementasi Prinsip Keadilan Terhadap Korban Kejahatan dalam Proses Pemidanaan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Alam. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(4), 300–311. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i4.215>
- Sidabutar, I. F., & Simarmata, B. (2024). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Profile Hukum*, 2(1), 57–89.
- Sihaloho, M., Syahputra, A., & Indra Saputra, F. (2025). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(10), 31–40. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Sutrisno, A. (2025). Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 17–28. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>
- Voviyanti, F., & Putri, S. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGY. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(2), 92–102. <https://doi.org/10.30624/sajv.v2i2>
- Wijaya, A. A. D. K., & Suidiana, A. A. KT. (2021). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENJUALAN MINUMAN FERMENTASI DAN DESTILASI KHAS BALI (KAJIAN PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2020). *JURNAL HUKUM MAHASISWA*, 01(02), 317–331.
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (2), 93–111.
- Wulandari, R. A. (2021). Juridical Analysis of Transitional Land Rights Unregistered in Dharmasraya Regency. *Atlantis Press SARL*, 535, 566–570.
- Yanita, H. (2016). ANALISIS STRUKTUR RETORIKA DAN PENANDA KEBAHASAAN BAGIAN HASIL DAN PEMBAHASAN ARTIKEL JURNAL PENELITIAN BISA FKIP UNIB UNTUK BIDANG PENGAJARAN BAHASA. *DIKSA Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), 165–170.
- Afgha, M. M. Al, Namura, S., & Pasulu, H. (2023, Juni 9). Polisi ringkus pasangan suami istri pelaku TPPO di Sumedang. *ANTARA Kantor Berita Indonesia*.

- kay/kid. (2025, Juli 19). Data Polri: 404 Orang Korban TPPO Sepanjang 2025. *CNN Indonesia*.
- Lesmana, T. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University.
- SBMI. (2025, Juni 20). *Kerja Tak Sesuai Harapan, PRT Migran Asal Sumedang Terjebak Perdagangan Orang di Malaysia*. Serikat Buruh Migran Indonesia.
- TBNews. (2024, Desember 25). Polres Sumedang Berhasil Ungkap Dua Kasus TPPO, Jadi Pemelihara Hewan hingga Pekerja Seks. *TBNews Polda Jawa Barat*.